



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

I N S P E K T O R A T

Pemalang, 18 Juli 2022

Nomor : 700/ 18 /EVS/2022

Kepada Yth.

Lampiran : -

Kepala Dinas Pertanian

Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2022

Kabupaten Pemalang

di--

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara “*self assesment*”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self-assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab		Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Dalnis/Supervisor		Drs. HERI SUYATNO
3.	Ketua Tim		ADJI NUSWANTORO, S.Hut
4.	Anggota		AGUS HASANI, S.IP., MM.
5.	Anggota		MINTARSIH, SE
6.	Anggota		SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota		KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Pematang

a) Dasar hukum pembentukan

Dinas Pertanian Kabupaten Pematang dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang.

b) Kedudukan

Dinas Pertanian Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok seperti yang tertera di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta sarana prasarana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta sarana prasarana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta sarana prasarana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siabu.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siabu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Pematang Siabu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Siabu Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong; Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siabu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 6 (enam).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siabu adalah 82,50. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Produktivitas Padi	56,71	60,64	106,93
2.	Produktivitas Jagung	56,8	57	100,35
3.	Produktivitas Kedelai	15	14,10	94
4.	Produksi Komoditas Peternakan Utama	18.676.590	16.339.567	87,48
5.	Skor pola pangan harapan (PPH)	88	93,50	106,25
6.	Cadangan pangan pemerintah	60	0	0

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 82,50 % termasuk dalam kategori cukup baik. Pencapaian tertinggi ada pada Produktivitas Padi yaitu mencapai 106,93% Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 7 (tujuh) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021.

mendapatkan nilai 21,6 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,8 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021 telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yaitu berupa :

a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja (SOP Perencanaan Kinerja).

- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
- d. Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Pendek
- e. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
- f. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 80,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- g. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- h. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- i. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Sedangkan dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 70,00.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- g. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- h. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 70,00.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan nilai 18,9 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 3,6 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 9 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja sebanyak 2 (dua) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. (SOP Pengukuran Kinerja)
- b. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Sedangkan dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 60.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- e. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- f. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- d. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- e. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- f. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 60.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan nilai 9,3 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,1 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 2,7 dengan bobot sebesar 4,5 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 4,5 dengan bobot 7,5 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang belum ada adalah : Nihil

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 70.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 60.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 7 (Tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- b. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- c. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 60.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan nilai 12,5 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 2,5 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot sebesar

7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,25 dengan bobot 12,5%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 3 (Tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

- a. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- c. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021 mendapatkan skor 62,3 dengan predikat kinerja **BAIK (B)**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30	21,6
		a. Keberadaan	6	4,8
		b. Kualitas / Mutu	9	6,3
		c. Pemanfaatan	15	10,5
2.	Pengukuran Kinerja		30	18,9
		a. Keberadaan	6	3,6
		b. Kualitas / Mutu	9	6,3
		c. Pemanfaatan	15	9
3.	Pelaporan Kinerja		15	9,3
		a. Keberadaan	3	2,1

		b. Kualitas / Mutu	4,5	2,7
		c. Pemanfaatan	7,50	4,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	12,5
		a. Keberadaan	5	2,5
		b. Kualitas / Mutu	7,5	3,75
		c. Pemanfaatan	12,5	6,25
	Total Nilai			62,3

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,62 yaitu dari 61.68 menjadi 62,3 pada tahun 2022

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.2. Rekomendasi.

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang dilampiri dengan SOP Perencanaan Kinerja.
- 2) Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar Penyesuaian Strategi.
- 3) Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- 4) Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja, dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan perbaikan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai **62,3** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,6
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,9
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,3
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,3

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 62,3 Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya termasuk dalam kategori penilaian "**BAIK**" (**B**)

dengan interpretasi bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

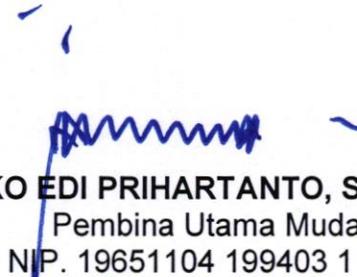
3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pematang agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 3) Melakukan revidi Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal

Pematang, 18 Juli 2022

INSPEKTUR KABUPATEN PEMATANG


EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

